

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Keanggotaan Komite

Komite Audit

Komite Pemantauan
Risiko

Komite Remunerasi
dan Nominasi

Komite Manajemen
Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	357
Tanggal akta pendirian	21-11-2003
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	196
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	16-12-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-0275799.AH.01.11.TAHUN 2024
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	17-12-2024
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	21-11-2004
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	PERBANKAN
Tempat kedudukan	PALEMBANG

0

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
---------------	--------

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga						
Penempatan pada bank lain						
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR						
b. Kepada Bank Umum						
c. Kepada non bank - pihak terkait						
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait						
Penyertaan Modal						
Jumlah Aset Produktif						

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
----------------	-----------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Penyebab utama kredit bermasalah, dikarenakan: 1. Gagal panen, sehingga Debitur tidak dapat membayar 2. Kredit digunakan oleh beberapa orang 3. Jaminan milik orang lain 4. Debitur yang meminjam hanya sekedar atas nama saja 5. Penghasilan usaha menurun.
Langkah Penyelesaian	Langkah penyelesaian yang telah dilakukan: 1. Memberikan Surat Peringatan sampai dengan surat untuk menyita jaminan 2. Melakukan penagihan secara continue baik kepada Debitur sendiri dan/atau yang memiliki jaminan dan/atau pihak lain yang menggunakan dana pencairan kredit 3. Menemui keluarga terdekat seperti orangtua yang bersangkutan untuk sama-sama mencari jalan keluar 4. Menerima pembayaran yang bersangkutan secara bertahap 5. Meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk penyelesaiannya 6. Membantu Debitur untuk menjual jaminanya.

Karena kondisi jarak yang jauh dan cuaca yang tidak menentu, sehingga terkendala waktu dalam penyelesaiannya.

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 2024

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

Jenis Kredit	Jumlah
Kredit KMK	205.102.404,00
Kredit KKB Mobil	449.992.775,00
Kredit KMG	374.235.602,00
Kredit DL	4.686.850.584,00
Kredit KPPR	661.133.296,00
Kredit KMK (Angsuran)	3.420.017.888,00
Kredit KAB	2.333.300.000,00
Total	12.130.632.549,00

Pada Tahun 2024 kerjasama BPR dengan perusahaan yang bergerak di penjualan alat pertanian semakin meningkat sehingga dibentuklah jenis kredit lain yang bisa mengakomodir pembiayaan tersebut yaitu Kredit Alat Berat. Jenis kredit ini tidak hanya untuk alat pertanian saja tetapi juga untuk alat berat lainnya seperti excavator. Dengan adanya peningkatan kerjasama inilah maka outstanding kredit semakin meningkat dan jenis kredit ini jaminan mesinnya diikat secara fidusia ditambah adanya jaminan SHM sawah yang diikat dibawah tangan, sehingga jika terjadi masalah dalam pembayaran perhitungan PPKA tidak langsung 100%.

B. Perubahan Penting Lainnya

1. Adanya pengangkatan Komisaris pada bulan Maret 2024 menggantikan Komisaris lama
2. Adanya penambahan biaya pendidikan dari yang dianggarkan karena :
 - Pada bulan Maret 2024 Direktur Bisnis tidak menjabat lagi sehingga pemegang saham mencari penggantinya dan akan mempersiapkannya untuk sertifikasi sehingga pada bulan Agustus 2024 Direktur Bisnis sudah aktif dan biaya pendidikan melebihi dari yang dianggarkan karena adanya biaya sertifikasi Direksi.
 - Adanya ketentuan untuk penerapan SAK EP terutama tentang CKPN sehingga harus mengikuti pelatihan beberapa kali yang diadakan oleh lembaga lain dan juga oleh *Core Banking System* yang kita gunakan.
3. Adanya ketentuan perubahan nama BPR dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dengan adanya perubahan nama ini maka ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh BPR yang mempengaruhi keuntungan BPR seperti :
 - Biaya barang cetakan
Barang cetakan yang lama harus dihanguskan jika masih menggunakan nama yang lama sehingga biaya untuk barang cetakan tersebut harus diakui secara keseluruhan dan BPR masih memiliki stok barang cetakan yang cukup banyak.
 - Perubahan Plank nama
Plank nama harus diganti karena menggunakan nama kepanjangan BPR yang lama dengan biaya yang lumayan mahal.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

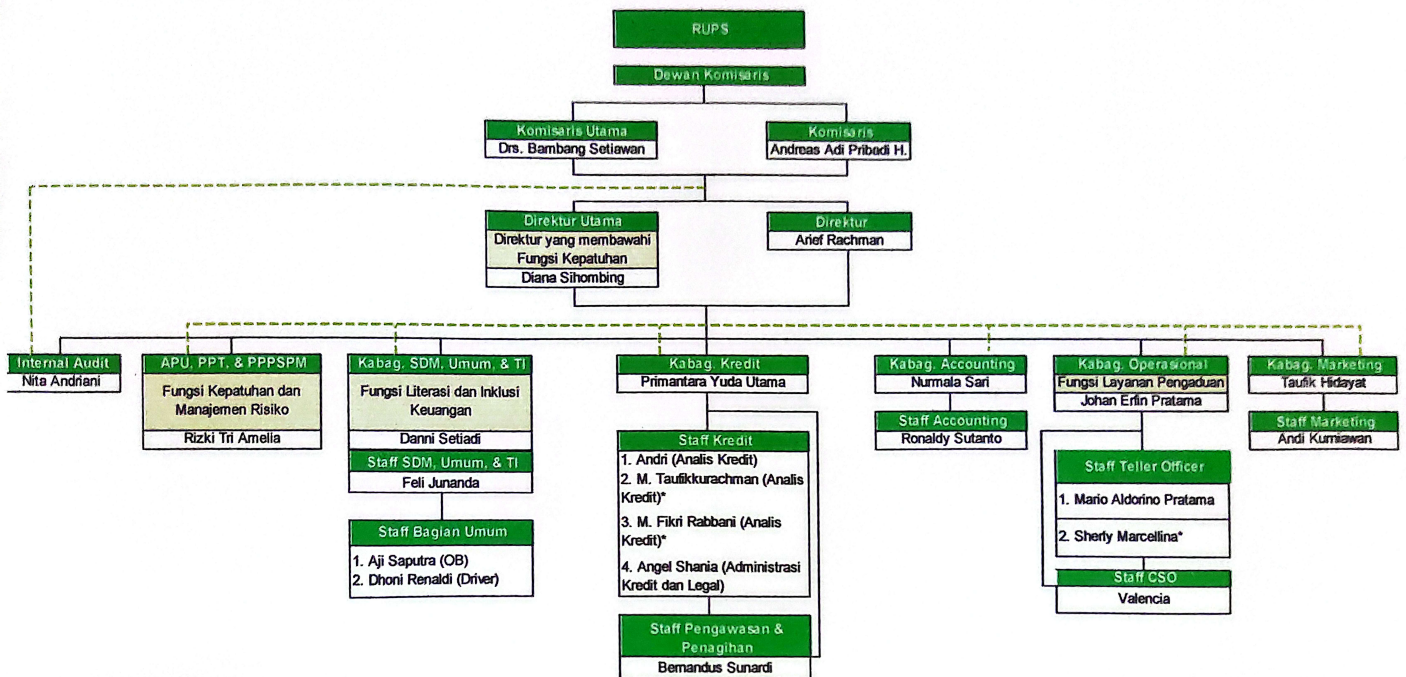
Nama BPR : PT BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 2024

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan volume bisnis BPR maka anggota RUPS memutuskan bahwa Direktur Bisnis harus diganti.
2. Mengurangi jenis kredit Demand Loan dimana jenis kredit ini jangka waktunya sangat pendek sekali dan rata-rata waktu pelunasannya sebagian besar di bulan yang sama yaitu antara Februari sampai dengan Mei Tahun berikutnya sehingga akan terlihat penurunan outstanding kredit yang sangat tajam di bulan tersebut. Sehingga Management memutuskan untuk meningkatkan lagi kerjasama dengan perusahaan alat pertanian dengan sistem pembayaran per panen dan jangka waktu maksimal 3 tahun.
3. Terus melakukan beberapa efisiensi di biaya sehingga pendapatan lebih optimal.
4. Ikut kredit sindikasi yang diadakan oleh BPR lain dan tetap mengutamakan kehati-hatian.
5. Menjaga hubungan baik dengan Debitur lama sehingga mereka akan bergabung kembali atau memberikan rekomendasi calon debitur lain.
6. Memberikan bunga special untuk debitur tertentu.
7. Untuk menjaga permodalan BPR agar tidak dibawah 6 M maka bagian penagihan harus bekerja keras untuk menjaga performing kredit dan memperkuat strategi penagihan.
8. DPK pada Tahun 2024 tidak secara agresif ditingkatkan agar biaya bunga bisa ditekan dan hal ini juga dilakukan karena masih banyak dana ABA yang bisa digunakan.
9. Menurunkan suku bunga kredit dengan berpatokan pada perhitungan BLR agar bisa bersaing dengan Bank lain.
10. Mengevaluasi pembentukan PYAD yang ada di system terutama untuk kredit mesin pertanian yang masa pembayarannya per 6 bulan atau per panen sehingga pendapatan bunganya tetap diakui secara *accrual*.
11. Strategi manajemen resiko dan tata kelola antara lain dengan memperkuat tim analis agar dalam melakukan survey lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah kredit bermasalah, meningkatkan peran Komisaris Utama dan Direktur Utama terutama pada saat kekosongan Komisaris dan Direktur Bisnis, meningkatkan peranan para Pejabat Eksekutif dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dan membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan berupa memo internal Direksi, Surat Keputusan Direksi, SOP dan ketentuan lain.

STRUKTUR ORGANISASI



---: Hubungan Kerja

* : Karyawan Masa Percobaan
PJS : Pejabat Sementara

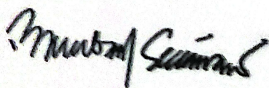
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 01 November 2024

Yang Menetapkan,


Diana Sihombing
Direktur Utama


Arief Rachman
Direktur

Yang Menyetujui,


Bambang Setiawan
Komisaris Utama


Andreas Adi Pribadi H.
Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan	Tabungan Mitra; Tabungan Central; Tabungan Dana; Tabunganku.
01	01	Deposito	Deposito 1 Bulan; 3 Bulan; 6 Bulan; 9 Bulan; 12 Bulan
02	01	Kredit	KMK-A (Kredit Modal Kerja-Angsuran); KMK-RK (Kredit Modal Kerja-Rekening Koran); KPR (Kredit Perbaikan Rumah); KPPR (Kredit Kepemilikan Rumah); KKB-MBL (Kredit Kendaraan Bermotor dan Mobil); KMG (Kredit Multi Guna); KP (Kredit Pegawai); DL (Demand Loan); KAB (Kredit Alat Berat).

Keterangan Footer 0502

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

Sistem yang digunakan dalam mendukung produk dan layanan perbankan adalah windows 10 64 bit.

B. Sistem Keamanan

Sistem keamanan yang kita gunakan adalah UPS dan Backup data harian Corebanking.

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Penyedia jasa Teknologi Informasi di BPR adalah PT USSI yang berkantor di Provinsi Bandung.

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT BPR Mitra Central Dana

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

Data Pertumbuhan Jenis-Jenis Kredit :

Jenis Kredit	Jumlah	
	2024	2023
Kredit KMK	205.102.404,00	1.000.000.000,00
Kredit KKB Mobil	449.992.775,00	917.568.302,00
Kredit KMG	374.235.602,00	224.265.050,00
Kredit DL	4.686.850.584,00	5.475.895.297,00
Kredit KPPR	661.133.296,00	104.581.535,00
Kredit KMK (Angsuran)	3.420.017.888,00	3.026.332.755,00
Kredit KAB	2.333.300.000,00	0,00
Total	12.130.632.549,00	10.748.642.939,00

Pada Tahun 2024 kredit mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan Tahun 2023 karena :

1. Adanya jenis kredit baru yaitu Kredit Alat Berat yang digunakan untuk jenis pembiayaan yang tujuannya untuk membeli alat pertanian dan alat berat.
2. Adanya kredit yang direkomendasikan oleh debitur lama.
3. Adanya kredit yang direkomendasikan oleh marketing *freelance*.
4. Adanya kerjasama dengan perusahaan mesin pertanian yang semakin aktif.
5. Pada Tahun 2024 kredit DL mulai sedikit dikurangi karena memiliki jangka waktu yang lebih pendek dan waktu pelunasannya rata-rata di bulan yang sama yaitu antara bulan Februari sampai dengan Mei di Tahun berikutnya.
6. Adanya kebijakan untuk menurunkan suku bunga kredit agar dapat bersaing dengan Bank lain.
7. Lebih selektif dalam memilih calon debitur dan dengan analisa yang lebih hati-hati.

Data Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Tabungan	13.916.571.158,00	13.794.311.074,00
Deposito	9.618.415.474,00	10.743.665.631,00
Total	23.534.986.632,00	24.537.976.705,00

Pada data di atas dana pihak ke tiga mengalami penurunan pada Tahun 2024 terutama pada jenis deposito, hal ini terjadi karena banyak deposan yang mencairkan dananya yang disebabkan karena tawaran bunga di Bank lain lebih menggiurkan terutama dari Bank Umum. Hal ini terjadi menjelang akhir Tahun dan selain itu juga banyak nasabah yang menarik dananya menjelang akhir Tahun karena pajak.

B. Target Pasar

Target pasar PT BPR Mitra Central Dana adalah semua sektor ekonomi yang ada di Palembang dan Kabupaten lainnya. Saat ini sektor ekonomi yang masih sangat dominan adalah dibidang pertanian didaerah Jalur dan Belitang yang lainnya adalah pembuatan tempe/tahu, jasa angkutan dan lainnya. Jenis Usaha yang diutamakan adalah UMKM selain itu hanya sekitar 1% saja, dan jenis penggunaan yang paling dominan adalah untuk modal usaha.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai					
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap	
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan
---	---------------------	----------------------	---------------------

Form A.05.06
Kerja sama BPR dengan Bank, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lain, atau Lembaga Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Keterangan : 0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	
2. Pelayanan	
3. Lainnya	
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	
2. Pegawai Tidak Tetap	
Tingkat Pendidikan	
1. S3	
2. S2	
3. S1	
4. D3	
5. SMA	
6. Lainnya	
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	
2. Perempuan	
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	
2. Usia 26-35 tahun	
3. Usia 36-45 tahun	
4. Usia 46-55 tahun	
5. Usia >55 tahun	

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi BPN di Palembang	10-07-2024	02	03	1	Fokus pada layanan pertanahan dan pendaftaran tanah, serta upaya digitalisasi dokumen pertanahan.
Sosialisasi PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan)	13-05-2024	02	03	2	meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peranan, fungsi, dan kewajiban PUJK, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh PUJK untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.
Sosialisasi terkait Pemanfaatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha	21-06-2024	02	03	3	Kegiatan penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, tentang pentingnya memiliki NIB dan cara mendapatkan NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Sosialisasi sprint modul PKK BPR dan wawancara DPS BPRS dan Pengumuman Go-line	04-07-2024	02	02	1	Mengenalkan aplikasi SPRINT kepada BPR dan BPRS di Indonesia; Menjelaskan mekanisme pengajuan perizinan melalui aplikasi SPRINT; Membantu BPR dan BPRS memahami fitur dan fungsi aplikasi SPRINT.
Sosialisasi E-Sertifikat BPN Palembang	10-07-2024	02	03	1	Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan sertifikat tanah.
Webinar dengan Tema "Penerapan Kepatuhan di Bank"	13-08-2024	02	02	2	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kepatuhan, serta memberikan solusi praktis bagi bank untuk mengelola risiko dan mematuhi regulasi.
Sosialisasi Dasar Penerapan SAKEP Pada BPR Client	27-08-2024	02	03	1	Membahas mengenai penerapan panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR.
Kegiatan Roadshow Governansi Transformasi Governansi Pilar Penyangga Integritas.	12-08-2024	02	02	1	Memperkuat tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan melalui berbagai kegiatan.
How To Prevent Money Laundering and Terrorism Financing	05-09-2024	02	03	1	Ini mengacu pada langkah-langkah dan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghalangi penyalahgunaan sistem keuangan untuk mencuci uang hasil kejahatan atau mendanai kegiatan teroris.
Penerapan Strategi Anti Fraud	05-09-2024	02	03	1	Upaya untuk pencegahan, pengendalian dan kontrol terhadap kegiatan atau tindak penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan maupun non keuangan bagi Perseroan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan serta Premi Program Penjaminan Simpanan (Sumatera selain SUMUT)	01-10-2024	02	02	2	Memberikan pemahaman kepada bank mengenai kewajiban membayar premi PRP dan bagaimana menghitungnya. LPS menetapkan format panduan tata cara perhitungan premi PRP.
Inhouse Training mengenai Service Excellent dan Perhitungan Bunga Kredit	28-08-2024	01	01	14	Memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan/i mengenai Service Excellent dan perhitungan bunga kredit agar seluruh karyawan dapat memahami serta menerapkan dalam lingkungan kerja.
Webinar UU Perlindungan Data Pribadi	08-10-2024	02	03	1	Memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital dan bagaimana UU PDP dapat diterapkan diberbagai sektor; Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan kerja mengenai hak-hak individu atas data pribadi dan kewajiban perusahaan dalam melindungi data tersebut.
Sosialisasi POJK Mengenai Kelembagaan dan Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS	05-11-2024	02	02	3	Memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua pemangku kepentingan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut.
Sosialisasi Perbarindo Sharing Bandwith	31-10-2024	02	03	1	Memberikan pemahaman dan edukasi kepada anggota Perbarindo tentang manfaat dan cara penggunaan sistem ini.
Sosialisasi POJK No 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan RPOJK Ketentuan BPR	07-11-2024	02	03	1	Meningkatkan pemahaman dan penerapan aturan baru terkait pelaporan keuangan bank dan ketentuan BPR; Memastikan bahwa bank dan BPR beroperasi dengan sesuai regulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas keuangan.
Pelatihan Penggunaan Tools SAK EP di PT. USSI PINBUK PRIMA	21-11-2024	02	03	1	Meningkatkan kemampuan dan pemahaman staf dalam menggunakan dan mengimplementasikan SAK EP dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, kredibel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR Tahun 2025	23-11-2024	02	02	1	RBB memabantu bank dalam memetakan kondisi saat ini, merencanakan kegiatan usaha jangka pendek dan menengah, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Inhouse Training mengenai Pembukuan, Rencana Bisnis Bank dan Manajemen Risiko	12-06-2024	01	01	7	Memberikan pemahaman dan edukasi kepada Karyawan/ti mengenai Pembukuan, RBB dan Manajemen Risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Inhouse Training mengenai Strategi Penjualan, Produk Kredit serta Ketentuan Funding dan Lending	15-08-2024	01	01	21	Memberikan pemahaman dan edukasi kepada Karyawan/ti mengenai Strategi Penjualan, Produk Kredit serta Ketentuan Funding dan Lending.
Inhouse Training Mengenai Analisa Kredit dan CKPN	29-08-2024	01	01	12	Memberikan pemahaman dan edukasi mengenai analisa kredit dan CKPN.
Inhouse Training Mengenai APU PPT PPSPM, Fraud, Judi Online dan Pinjaman Online	13-11-2024	01	01	18	Memberikan pemahaman dan edukasi mengenai APU PPT PPSPM, Fraud, Judi Online dan Pinjaman Online agar seluruh karyawan/ti dapat menerapkannya di lingkungan BPR.
Inhouse Training Mengenai Perlindungan Konsumen	26-11-2024	01	01	16	Memberikan pemahaman dan edukasi mengenai perlindungan konsumen kepada seluruh karyawan/ti
Sosialisasi dan Diskusi Teknis terkait Penggunaan Aplikasi Corebanking (IBS APU PPT, IBS CKPN, dan IBS SAK EP)	17-12-2024	01	01	16	Memberikan pemahaman dan edukasi mengenai penggunaan Aplikasi Corebanking (IBS APU PPT, IBS CKPN, dan IBS SAK EP).
Sosialisasi ketentuan Perbankan	28-11-2024	02	03	5	Mmberikan informasi tentang peraturan perbankan kepada pihak terkait, seperti BPR dan stakeholder, agar mereka memahami dan dapat mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efektif.
Sosialisasi RPOJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (KK PIKK)	02-12-2024	02	03	1	Bahwa PUJK memahami dan dapat mengimplementasikan RPOJK KK PIKK dengan benar, sehingga dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan di sektor jasa keuangan.
Pelatihan Penerapan POJK No 15 Tahun 2024 Bagi BPR dan BPRS	12-12-2024	02	03	1	Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi, tata kelola, dan pengendalian internal yang lebih ketat dalam proses pelaporan keuangan bank.

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)		
-/- Provisi Belum Diamortisasi		
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Agunan yang diambil alih		
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Aset Tidak Berwujud		
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai		
Aset Antarkantor		
Aset Keuangan Lainnya		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Lainnya		
TOTAL ASET		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		
Simpanan		
a. Tabungan		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
b. Deposito		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Simpanan dari Bank Lain		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Pinjaman yang Diterima		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Diskonto Belum Diamortisasi		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Liabilitas Antarkantor		
Liabilitas Lainnya		
TOTAL LIABILITAS		
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar		
b. Modal yang Belum Disetor -/-		
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio		
b. Modal Sumbangan		
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas		
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
c. Lainnya		
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		
Cadangan		
a. Umum		
b. Tujuan		
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu		
b. Tahun Berjalan		
TOTAL EKUITAS		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional		
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga		
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro		
Tabungan		
Deposito		
Sertifikat Deposito		
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga		
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi		
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing		
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga		
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku		
e Pemulihan CKPN		
f Dividen		
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		
h Keuntungan penjualan AYDA		
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi		
j Pemulihan penurunan nilai AYDA		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya		
Beban Operasional		
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan		
ii. Deposito		
iii. Simpanan dari bank lain		
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia		
2) Dari Bank Lain		
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
4) Berupa Pinjaman Subordinasi		
v. Lainnya		
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga		
b. Penempatan pada Bank Lain		
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
d. Penyertaan Modal		
e. Aset Keuangan Lainnya		
4 Beban Pemasaran		
5 Beban Penelitian dan Pengembangan		
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah		
ii. Honorarium		
iii. Lainnya		
b Beban Pendidikan dan Pelatihan		
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor		
ii. Lainnya		
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris		
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
f Beban Premi Asuransi		
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
h Beban Barang dan Jasa		
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi		
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal		
b. Kejahatan eksternal		
k Pajak-pajak		
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing		
b Kerugian Penjualan Surat Berharga		
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method		
d Kerugian penjualan AYDA		
e Kerugian penurunan nilai AYDA		
f Lainnya		
Laba (Rugi) Operasional		
Pendapatan Non Operasional		
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Beban Non Operasional		
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Laba (Rugi) Non Operasional		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pendapatan Pajak Tangguhan		
Beban Pajak Tangguhan		
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		
b. Tagihan Komitmen Lainnya		
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
b. Penerusan Kredit		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan		
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain		
3) Surat Berharga		
4) Lainnya		
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan		
2) Penempatan pada Bank Lain		
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku		
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku		
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
Kewajiban Kontinjensi		
Rekening Administratif Lainnya		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
-----	---------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga		
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi		
Penerimaan beban klaim asuransi		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Pendapatan operasional lainnya		
Pembayaran beban bunga		
Beban gaji dan tunjangan		
Beban umum dan administrasi		
Beban operasional lainnya		
Pendapatan non operasional lainnya		
Beban non operasional lainnya		
Pembayaran pajak penghasilan		
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban		
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain		
Kredit yang diberikan		
Agunan yang diambil alih		
Aset lain-lain		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera		
Tabungan		
Deposito		
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja		
Liabilitas lain-lain		
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Arus Kas neto dari aktivitas operasi		
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris		
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud		
Pembelian/penjualan Surat Berharga		
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi		
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan		
Pembayaran dividen		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan		
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		
Kas dan setara Kas awal periode		
Kas dan setara Kas akhir periode		

**PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO MACHDJUD MODOPURO
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

Jl. Cempaka Putih Barat 13 No. G.10 Jakarta 10520 (Pusat)
Perum. Taman Palem Permai II Blok B1 No.5 Jl. Raden Gunawan II Rajabasa Pemuka,
Rajabasa Bandar Lampung - Lampung 35144 (Cabang)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PT. BPR MITRA CENTRAL DANA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diana Sihombing
Alamat Kantor : Jl. Mesjid Lama No. 138A Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang
Alamat Domisili : Jl. Betawi II Komp. Putri Garden Blok A.5 Kel. Lebung Gajah
Kec. Sematang Borang Palembang.
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT. BPR Mitra Central Dana menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Mitra Central Dana.
2. Laporan Keuangan PT. BPR Mitra Central Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Mitra Central Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT. BPR Mitra Central Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah disusun dan disimpan oleh PT. BPR Mitra Central Dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT. BPR Mitra Central Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 11 Pebruari 2025
PT. BPR Mitra Central Dana


Diana Sihombing
Direktur Utama

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Lampiran :	
Capital.....	I
Asset Quality.....	II
PPAPWD dan NPL.....	III
Ratio Earning.....	IV
Ratio Likuiditas.....	V



NO: 00025/3.0385/AU.2/07/1558-4/1/II/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR Mitra Central Dana
Jl. Mesjid Lama No. 138 A Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Mitra Central Dana, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN**

Keputusan Menteri Keuangan RI No. : KEP-1021/KMK.17/1998; 658/KM.1/2018; 79/KM.1/2019; 509/KM.1/2019

Perum. Taman Palem Permai II, Blok B1 No.05

Jl. Raden Gunawan II, Rajabasa Pemuka, Rajabasa, Bandar Lampung - Lampung 35144

Contact Person : +62 813 6945 5356 / +62 896 0814 7795; Email : elndeavana@yahoo.co.id / kaptmee57@gmail.com



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan
Partner,



Dr. Elnde Evana, S.E. M. Si., Ak., CA, CPA.

Nikap KEP 1021/KM.VI/1998

Nikap Cab 658/KM.1/2018

NIAP 1558

Bandar Lampung, 11 Februari 2025



00025

Kantor Pusat

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307

Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320

Telp.: (021) 3151534, (021) 42882578, Facs.: (021) 42882577

Email : kaptjm@rad.net.id

Cabang Denpasar

Jl. Drupadi XIV No. 3, Sumerta Kelod,

Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80235

Telp.: (0361) 4745880; Facs.: (0361) 4745880;

Email : kap.tjahjodenpasar@gmail.com

Cabang Bogor

Jl. Raya Karanggan No. 234, Karanggan,
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16960

Telp.: (021) 83724156; Facs.: (021) 83724156;

Email : pujihantomo.kap@gmail.com

Dalam Rupiah (Rp)			
ASET	Catatan	2024	2023
ASET LANCAR			
Kas	3.1	71.060.500	59.355.100
Pendapatan Yang Akan Diterima	3.2	152.197.847	138.501.117
Penempatan Pada Bank Lain	3.3	17.480.326.448	19.762.230.539
Cadangan Penyisihan Kerugian	3.3.d	(2.500.000)	(7.500.000)
Jumlah Aset Lancar		17.701.084.795	19.952.586.755
Kredit Yang Diberikan	3.4	12.130.632.549	10.748.642.939
Provisi & Administrasi		(112.279.620)	(84.749.584)
Penyisihan Kerugian		(378.794.005)	(409.407.635)
Jumlah		11.639.558.923	10.254.485.720
ANGUNAN YANG DIAMBIL ALIH	3.5	269.609.236	269.609.236
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP			
Aset Tetap & Inventaris	3.6	1.266.947.392	1.186.976.808
Akumulasi Penyusutan		(1.008.497.869)	(966.385.646)
Nilai Buku Aset Tetap		258.449.523	220.591.162
ASET LAIN-LAIN	3.7	263.852.570	426.249.002
Jumlah Aset Tidak Lancar		522.302.094	646.840.164
TOTAL ASET		30.132.555.048	31.123.521.875
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN LANCAR			
Kewajiban Segera Dibayar	3.8	89.209.185	84.357.099
Hutang Bunga	3.9	16.935.114	18.510.493
Hutang Pajak	3.10	641.523	356.398
Simpanan - Simpanan	3.11	23.534.986.632	24.537.976.705
Kewajiban Imbalan Kerja	3.12	8.313.120	1.683.209
Kewajiban Lain-lain	3.13	1.999.499	15.311.284
Jumlah Kewajiban Lancar		23.652.085.073	24.658.195.188
Jumlah Kewajiban		23.652.085.073	24.658.195.188
EKUITAS			
Modal Disetor	3.14	4.850.000.000	4.850.000.000
Cadangan - Cadangan		871.903.883	871.903.883
Laba Ditahan		743.666.502	980.275.187
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		14.899.591	(236.852.383)
Jumlah Ekuitas		6.480.469.976	6.465.326.687
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30.132.555.048	31.123.521.875

Palembang, 11 Februari 2025

PT. BPR Mitra Central Dana

Direktur Utama,


Diana Sihombing

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BPR MITRA CENTRAL DANA

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA

LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN BUNGA	3.15		
Bunga Kontraktual		2.811.568.175	2.759.082.136
Provisi dan Administrasi		129.228.477	110.828.639
Beban Transaksi		1.443.640	-
Jumlah Pendapatan Bunga		2.942.240.292	2.869.910.774
Beban Bunga	3.17	(755.838.366)	(830.725.955)
Pendapatan Operasional Lainnya	3.16	190.164.125	329.619.321
Jumlah Pendapatan Operasional		2.376.566.051	2.368.804.140
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Kerugian & Penyusutan	3.18	88.862.220	96.468.926
Beban Pemasaran	3.19	2.915.500	2.561.200
Beban Administrasi dan Umum	3.20	2.233.643.375	2.472.981.733
Beban Operasional Lainnya	3.21	7.183.860	5.158.766
Jumlah Beban Operasional	3.22	2.332.604.956	2.577.170.625
Laba (Rugi) Operasional		43.961.095	(208.366.485)
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Non Opsional	3.23	-	-
Beban Non Operasional	3.24	(27.219.981)	(26.929.500)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(27.219.981)	(26.929.500)
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		16.741.114	(235.295.985)
PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.25	1.841.523	1.556.398
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	3.26	14.899.591	(236.852.383)

Palembang, 11 Pebruari 2025

PT. BPR Mitra Central Dana

Direktur Utama,



Diana Sihombing

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)				
Keterangan	Modal Disetor	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 1 Januari 2023	4.350.000.000	871.903.883	996.045.455	6.217.949.338
Kenaikan (Penurunan) Tahun 2023	500.000.000	-	(15.770.268)	484.229.732
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2023	-	-	(236.852.383)	(236.852.383)
Saldo, Tanggal 31 Desember 2023	4.850.000.000	871.903.883	743.422.804	6.465.326.687
Kenaikan (Penurunan) Tahun 2024	-	-	243.698	243.698
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2024	-	-	14.899.591	14.899.591
Saldo, Tanggal 31 Desember 2024	4.850.000.000	871.903.883	758.566.093	6.480.469.976

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
 LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Dalam Rupiah (Rp)	
KETERANGAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14.899.591	(236.852.383)
Penyesuaian untuk :		
- Cadangan PPAP Penempatan	(5.000.000)	7.500.000
- Provisi dan Administrasi	27.530.036	16.662.144
- Cadangan PPAP Pinjaman	(30.613.630)	(46.506.551)
- Penyusutan Aset Tetap	42.112.222	69.468.926
Perubahan dalam Aset dan Kewajiban Operasi :		
- Pendapatan Yang Akan Diterima	(13.696.730)	(13.371.080)
- Penempatan Pada Bank Lain	2.281.904.090	3.600.023.160
- Kredit Yang Diberikan	(1.381.989.610)	(1.761.193.556)
- Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	-	-
- Aset Lain-Lain	162.396.432	119.816.580
- Kewajiban Segera Dibayar	4.852.086	18.023.708
- Hutang Bunga	(1.575.379)	(2.212.140)
- Hutang Pajak	285.125	356.398
- Simpanan	(1.002.990.073)	(2.159.344.709)
- Kewajiban Imbalan Kerja	6.629.911	(24.117.802)
- Kewajiban Lain - Lain	(13.311.785)	8.016.960
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	91.432.286	(403.730.344)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pembelian/Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(79.970.584)	(99.777.188)
ARUS KAS BERSIH YG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(79.970.584)	(99.777.188)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Modal Disetor	-	500.000.000
- Cadangan	-	-
- Laba Ditahan	(236.608.685)	(317.625.063)
- Laba (Rugi) Tahun Lalu	236.852.383	301.854.795
ARUS KAS BERSIH YG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	243.698	484.229.732
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	11.705.400	(19.277.800)
KAS PADA AWAL TAHUN	59.355.100	78.632.900
KAS PADA AKHIR TAHUN	71.060.500	59.355.100

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2024 Dan 2023
(Dalam Rupiah)

1. GAMBARAN UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Central Dana didirikan pada tanggal 21 Nopember 2003 dihadapan Notaris Husnawaty, SH di Palembang dengan Akte Notaris No. 357 tanggal 21 Nopember 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10465.HT.2004 tanggal 28 April 2004 dan telah diundangkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 83 tanggal 18 Oktober 2005.

Berdasarkan Akta No. 196 tanggal 16 Desember 2024 dari Notaris Husnawaty, SH, disebutkan adanya perubahan nama perseroan (Nomenklatur) dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Mitra Central Dana menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana, selanjutnya disingkat PT. BPR Mitra Central Dana.

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, perseroan melakukan kegiatan usaha :

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito Berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- Menyalurkan kembali dana masyarakat tersebut diatas pada pihak-pihak (masyarakat) yang memerlukan dalam bentuk pinjaman (kredit).
- Menerima dana dan menempatkan dana pada bank lain dalam bentuk SBI, Sertifikat Deposito, Deposito Berjangka dan atau Tabungan pada bank lain.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No.135 tanggal 24 September 2019 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0338979 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 dari Notaris Husnawaty,SH, Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) yang terbagi atas 6.000 (Enam Ribu) lembar saham dengan Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per lembar

Berdasarkan Akta No. 93 tanggal 11 Oktober 2022, Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 4.350.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan kepemilikan sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nomina (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Tn. F. Harjono Setiawan	1.025	1.000.000	24	1.025.000.000
2.	Ny. Lucy	1.825	1.000.000	42	1.825.000.000
3.	Nn. Silvia Suhan	375	1.000.000	9	375.000.000
4.	Nn. Sophia SH	375	1.000.000	9	375.000.000
4.	Nn. Imelda SH	375	1.000.000	9	375.000.000
5.	Tn. Andreas AP	375	1.000.000	9	375.000.000
Total		4.350		100	4.350.000.000

Berdasarkan Akta No. 254 tanggal 25 Nopember 2023, disebutkan adanya penambahan Modal Disetor sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 4.850.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan kepemilikan sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nomina (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Tn. F. Harjono Setiawan	1.025	1.000.000	21,14	1.025.000.000
2.	Ny. Lucy	2.325	1.000.000	47,94	2.325.000.000
3.	Nn. Silvia Suhann	375	1.000.000	7,73	375.000.000
4.	Nn. Sophia SH	375	1.000.000	7,73	375.000.000
4.	Nn. Imelda SH	375	1.000.000	7,73	375.000.000
5.	Tn. Andreas AP	375	1.000.000	7,73	375.000.000
Total		4.850		100	4.850.000.000

Berdasarkan Akte Notaris Husnawaty, SH No. 265 tanggal 26 Agustus 2024, susunan Kepengurusan PT. BPR Mitra Central Dana, adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Tn. Drs. H. Bambang Setiawan
- Komisaris : Tn. Andreas Adi Pribadi Harjono
- Direktur Utama : Ny. Diana Sihombing
- Direktur : Tn. Arief Rachman

Dalam melakukan aktivitas usahanya, PT. BPR Mitra Central Dana telah memiliki surat izin usaha yang antara lain:

- a. Akte Pendirian No. 357 tanggal 21 Nopember 2003 dari Notaris Husnawati, SH di Palembang.
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 2145 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004.
- c. Surat Izin Bank Indonesia No. 6/1/DPBPR/P3BPR/Pg, tanggal tanggal 28 Oktober 2004.
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120201881755, tanggal 15 Agustus 2019.
- e. Surat Izin Walikota Palembang No. 503/IG.R/4275/DPPTSP-PPK/2017.
- f. NPWP No. 02.181.397.7-308.000

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT BPR Mitra Central Dana mengacu pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PA BPR di Indonesia sebagai basis penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar :

- Dasar akrual (*accrual basis*) , kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis (*historical cost*) , kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

b. Transaksi Dengan Pihak - Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi hubungan istimewa meliputi pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Transaksi tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan.
2. Perusahaan asosiasi.
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya
4. Karyawan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan.
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) dan (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

c. Kas

Kas terdiri dari mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas meliputi Kas Besar, Kas Kecil, Kas dalam mesin ATM dan Kas dalam perjalanan. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud, tidak termasuk dalam pengertian Kas dan disajikan dalam Aset

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima terdiri dari pendapatan bunga dari kualitas kredit dengan Kualitas Lancar yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan bunga dari penempatan pada bank lain.

c. Antar Bank Aset

Adalah penempatan dana pada Bank Konvensional dan Bank Syariah lainnya, baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito dengan maksud untuk optimalisasi pengelolaan dana.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit Yang Diberikan dinyatakan sebesar Saldo Pinjaman setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Kredit. Bank membentuk Penyisihan Kerugian Kredit (PPAP) berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo pinjaman pada akhir tahun, dan disajikan sebagai

Kredit diklasifikasikan sebagai Non Performing pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga pinjaman tersebut diragukan. Pendapatan Bunga atas pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai diragukan ini, diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit Yang Diberikan, akan dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap Penyisihan Kerugian Kredit dari Nilai Pokok, jika penerimaan kembali melebihi nilai pokoknya, maka kelebihanannya diakui sebagai Pendapatan Bunga.

g. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aktiva produktif pada akhir tahun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, dimana dinyatakan tentang besarnya penyisihan yang harus dibentuk, sebagai berikut :

- Golongan I - Lancar : Jumlah X 0,5%
- Golongan II - Dalam Perhatian Khusus : Jumlah X 3%
- Golongan III - Kurang Lancar : Jumlah - Agunan = Hasil X 10%
- Golongan IV - Diragukan : Jumlah - Agunan = Hasil X 50 %
- Golongan V - Macet : Jumlah - Agunan = Hasil X 100%

Besarnya Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada penyisihan, adalah sebagai berikut :

- 100% dari Nilai Agunan yang bersifat likuid.
- 80% dari Nilai Hak Tanggungan untuk agunan berupa tanah dan bangunan bersertifikat (SHM atau SHGB), yang diikat dengan Hak Tanggungan.
- 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB), Hak Pakai Tanpa Hak Tanggungan.
- 50% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan Surat Girik (Letter C) dilampiri SPPT terakhir.
- 50 % dari Nilai Pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor disertai dengan bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktiva Produktif dihapusbukukan pada saat manajemen berkeyakinan bahwa aktiva produktif tersebut sudah tidak tertagih lagi. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai Penambahan Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif yang bersangkutan selama tahun berjalan.

h. Aset Tetap

Aset Tetap (berwujud), dinyatakan berdasarkan Nilai Perolehan (*Historical Cost*) dengan taksiran umur lebih dari 1 (satu) tahun. Atas aset tetap ini, kecuali tanah, setiap tahun secara taat asas telah dilakukan Penyusutan (Depresiasi) yang menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dan pada akhir tahun dikapitalisasi pada biaya operasional.

No	Nama Aset Tetap	Umur Ekonomis	Prosentase
1	Tanah	Tidak Disusutkan	0%
2	Bangunan	20	5%
3	Inventaris Golongan I	4	25%
4	Inventaris Golongan II	8	12,5%

Pengeluaran setelah Nilai Perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat (umur ekonomis) di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan, sedangkan biaya pemeliharaan dan reparasi yang timbul atas aset tersebut, dicatat sebagai biaya dalam laporan rugi laba pada periode terjadinya.

Aset Tetap yang berasal dari sewa pembiayaan, disajikan tersendiri dalam Pos Aset Tetap serta Kewajiban Sewa Pembiayaan disajikan dalam Pinjaman Yang Diterima.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka (disajikan dalam akun Aset Lain-Lain), diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

j. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun Aset Lain - Lain) diakui sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasi, yaitu Nilai Wajar Aktiva setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih antara nilai aktiva yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan pada saat penjualan aktiva. Biaya-biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan aktiva tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Rugi atau Laba atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih diakui pada laporan rugi laba pada saat terjadinya.

k. Beban Ditangguhkan

Beban Ditangguhkan (disajikan dalam akun Aset Lain - Lain) diamortisasi selama masa manfaat biaya ditangguhkan tersebut.

l. Kewajiban Segera Dibayar

Kewajiban Segera Dibayar merupakan kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera diselesaikan.

m. Tabungan dan Deposito Berjangka (Simpanan)

Tabungan merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati, dan dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di bank.

Deposito Berjangka merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan bank dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

n. Kewajiban Lain - Lain

Kewajiban Lain - Lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos sendiri.

o. Modal Disetor

Modal Disetor diakui pada saat penerimaan Setoran Modal Bank berupa Kas maupun Asset Non Kas. Modal Disetor dicatat berdasarkan :

- Jumlah uang yang diterima.
- Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
- Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
- Setoran saham dalam deviden saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
- Nilai wajar Aset Non Kas yang diterima.

p. Cadangan

Menurut Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Bank wajib setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai 20 % dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud, akan ditentukan oleh RUPS.

q. Saldo Laba (Rugi)

Saldo Laba merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden, koreksi rugi laba periode lalu dan reklasifikasi surplus dan revaluasi asset tetap.

Saldo Laba dikelompokkan menjadi :

- Cadangan Tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
- Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya terdiri dari laba periodik lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dalam rugi laba periode berjalan.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Bank mengakui pendapatan dan biaya bunga dengan menggunakan Metode Akrua. Bank tidak mengakui pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang telah diklasifikasikan sebagai Non Performing. Pendapatan bunga atas Aktiva Non performing yang belum diterima dicatat sebagai tagihan kontijensi.

Yang dimaksud dengan Aktiva Produktif Non Performing, adalah bilamana terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga dan cerukan sebagaimana tercatat dalam ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Provisi dan Administrasi

- Provisi yang sehubungan dengan kredit yang diberikan diakui sebagai pendapatan provisi yang diamortisasi selama jangka waktu kredit.
- Provisi yang sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari bank umum, diamortisasi selama jangka waktu pinjaman yang diterima.

s. Aspek Perpajakan

Kewajiban Pajak Kini ditentukan berdasarkan Laba Kena Pajak dalam periode yang bersangkutan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak Badan yang disajikan dalam laporan audit, disajikan berdasarkan estimasi (taksiran) sesuai dengan ketentuan tarif pajak badan yang berlaku.

t. Reklasifikasi

Guna kesesuaian penyajian laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dilakukan reklasifikasi akun.

u. Aspek Perpajakan dan Imbalan Kerja

PT. BPR Mitra Central Dana telah menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang menganut "*Self Assesment System*" dan perusahaan sudah membukukan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja" serta ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

3.1. Kas

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Kas Khasanah	71.060.500	59.355.100
Saldo Kas	71.060.500	59.355.100

3.2. Pendapatan Yang Akan Diterima

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
- PBYAD Bunga Deposito	45.256.860	52.100.149
- PBYAD Kredit KMK - RK	-	-
- PBYAD Kredit KKB Mobil	3.858.527	7.175.116
- PBYAD Kredit KPR	-	-
- PBYAD Kredit KPPR	3.084.911	2.915.051
- PBYAD Kredit KMG	2.952.423	3.974.318
- PBYAD Kredit KMK - Angsuran	47.634.567	19.551.003
- PBYAD Kredit DL	38.440.411	52.785.479
- PBYAD Kredit KAB	10.970.148	-
Saldo Pendapatan Yang Akan Diterima	152.197.847	138.501.117

3.3. Penempatan Pada Bank Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Penempatan Pada Bank Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Giro Pada Bank Lain :	2024	2023
- Giro PT. Bank Central Asia	31.569.004	50.784.259
- Giro PT. Bank Mandiri	616.806.429	20.449.681
- Giro PT. Bank Panin	40.325.437	41.656.437
- Giro PT. Bank J. Trust	466.800.110	896.462.072
- Giro PT. Bank Permata	17.518.380	93.642.573
- Giro PT. Bank UOB Buana	-	17.145.035
- Giro PT. Bank MayBank	67.319.200	27.251.944
- Giro PT. Bank Sumsel	17.632.399	35.840.834
- Giro PT. Bank Negara Indonesia	168.780.648	3.916.531
- Giro PT. Bank Mayapada Internasional	-	211.656.153
- Giro PT. Bank Danamon Indonesia	119.381.832	74.258.310
- Giro PT. Bank BJB	115.172.221	-
- Giro PT. Bank Maspion	924.790	-
Saldo Giro	1.662.230.450	1.473.063.829
b. Tabungan Pada Bank Lain :		
- Tabungan PT. Bank Central Asia Bisnis	8.646.360	9.814.310
- Tabungan PT. Bank Central Asia Bisnis 2	-	49.790.757
- Tabungan PT. Bank Central Asia Payroll	54.514.156	66.384.865
- Tabungan PT. Bank Maspion	52.854.731	73.895.454
- Tabungan PT. BPR Intan Jabar	2.080.751	89.281.325
Saldo Tabungan	118.095.999	289.166.710

c. Deposito Pada Bank Lain :

- Deposito PT. Bank Mutiara / J Trust	500.000.000	500.000.000
- Deposito PT. Bank Maspion	-	500.000.000
- Deposito PT. BPR Agritrans Batumarta	800.000.000	800.000.000
- Deposito PT. BPRS Sukawati Pancakanti	-	600.000.000
- Deposito PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Akasia Mas	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Genteng	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Rama Ganda	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Gunung Slamet	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Wingsati	500.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Artha Rahayu	900.000.000	900.000.000
- Deposito PT. BPR Sahabat Sejati	900.000.000	900.000.000
- Deposito PT. BPR Aditama Arta	500.000.000	900.000.000
- Deposito PT. BPR Gerbang Serasan	800.000.000	800.000.000
- Deposito PT. BPR Marcorindo Perdana	500.000.000	500.000.000
- Deposito PT. BPR Palembang	400.000.000	400.000.000
- Deposito PT. BPR Karunia Kanaka	500.000.000	200.000.000
- Deposito PT. BPR Baturaja	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPR Bank Karanganyar	900.000.000	900.000.000
- Deposito PT. BPR HIK Parahyangan	-	500.000.000
- Deposito PT. BPR Intan Jabar	600.000.000	900.000.000
- Deposito PT. BPR Leuwiliang Parung Panjang	400.000.000	800.000.000
- Deposito PT. BPR Primadana Abadi	500.000.000	500.000.000
- Deposito PT. BPR Bintang Dana Persada	1.000.000.000	-
- Deposito PT. BPR Cinde Wilis	-	400.000.000
Saldo Deposito	15.700.000.000	18.000.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	17.480.326.448	19.762.230.539
d. Cadangan Penyisihan Kerugian	(2.500.000)	(7.500.000)

3.4. Kredit Yang Diberikan

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kredit Yang Diberikan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- KYD Kredit KMK - RK	205.102.404	1.000.000.000
- KYD Kredit KKB Mobil	449.992.775	917.568.302
- KYD Kredit KPPR	661.133.296	104.581.535
- KYD Kredit KMG	374.235.602	224.265.050
- KYD Kredit KMK - Angsuran	3.420.017.888	3.026.332.755
- KYD Kredit DL	4.686.850.584	5.475.895.297
- KYD Kredit KAB	2.333.300.000	-
Saldo Kredit Yang Diberikan	12.130.632.549	10.748.642.939
Provisi Kredit	(75.416.286)	(55.672.537)
Administrasi Kredit	(38.306.974)	(29.077.047)
Beban Transaksi	1.443.640	-
Cadangan PPAP Kredit	(378.794.005)	(409.407.635)
Saldo Kredit Yang Diberikan (Netto)	11.639.558.923	10.254.485.720

3.5. Agunan Yang Diambil Alih

Jumlah tersebut merupakan Saldo Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
- Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	269.609.236	269.609.236
Saldo Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	269.609.236	269.609.236

3.6. Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan Nilai Buku Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Nilai Perolehan		
- Kendaraan	342.757.300	342.757.300
- Peralatan Gedung	189.695.540	126.545.540
- Peralatan Kantor	451.532.852	434.712.268
- Furniture & Fixture	282.961.700	282.961.700
Saldo Nilai Perolehan	1.266.947.392	1.186.976.808
b. Akumulasi Penyusutan	(1.008.497.869)	(966.385.646)
c. Nilai Buku Aset Tetap	258.449.523	220.591.162

3.7. Aset Lain - Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset lain - Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Persediaan Materai & Barang Cetak	40.781.824	67.564.774
- BDD Sewa	197.916.667	322.916.667
- BDD Asuransi	21.471.371	21.542.561
- BDD Akuntan Publik	-	9.990.000
- Uang Muka Pajak Kendaraan	3.682.708	4.235.000
Saldo Aset Lain - Lain	263.852.570	426.249.002

3.8. Kewajiban Segera Dibayar

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Segera Dibayar Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- KSD PPh Pasal 21 Karyawan	4.205.400	8.856.841
- KSD PPh Pasal 23 Tabungan	5.205.353	5.243.650
- KSD PPh Pasal 23 Deposito	6.097.109	6.673.442
- KSD PPh Pasal 25 Desember	100.000	100.000
- KSD Titipan Nasabah	70.000.000	63.483.166
- KSD Lainnya	3.601.323	-
Saldo Kewajiban Segera Dibayar	89.209.185	84.357.099

3.9. Hutang Bunga

Jumlah tersebut merupakan Saldo Hutang Bunga Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Bunga Akrual Deposito	16.935.114	18.510.493
Saldo Hutang Bunga	16.935.114	18.510.493

3.10. Hutang Pajak

Jumlah tersebut merupakan Saldo Hutang Pajak Penghasilan Badan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- PPh Pasal 25 / 29 Badan	641.523	356.398
Saldo Hutang Pajak	641.523	356.398

3.11. Simpanan - Simpanan

Jumlah tersebut merupakan Saldo Simpanan Pihak Ketiga pada Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Tabungan :		
- Tabungan Mitra	231.719.400	141.450.200
- Tabungan Central	6.095.607.033	6.325.457.272
- Tabungan Dana	6.951.723.422	6.655.995.121
- Tabungan KU	637.521.302	671.408.481
Saldo Tabungan	13.916.571.158	13.794.311.074
b. Deposito Berjangka :		
- Deposito Berjangka 01 Bulan	9.512.567.737	10.553.885.369
- Deposito Berjangka 03 Bulan	-	69.052.100
- Deposito Berjangka 06 Bulan	91.766.036	100.775.185
- Deposito Berjangka 12 Bulan	14.081.701	19.952.977
Saldo Deposito	9.618.415.474	10.743.665.631
Saldo Simpanan	23.534.986.632	24.537.976.705

3.12. Kewajiban Imbalan Kerja

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Imbalan Kerja yang harus dicadangkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 & 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	8.313.120	1.683.209
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	8.313.120	1.683.209

3.13. Kewajiban Lain - Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Lain - Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 & 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Cadangan Dana Pendidikan	49.499	13.361.284
- Titipan Notaris	1.950.000	1.950.000
Saldo Kewajiban Lain - Lain	1.999.499	15.311.284

3.14. EKUITAS

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Modal Disetor :		
- Modal Dasar	6.000.000.000	6.000.000.000
- Modal Belum Disetor	(1.150.000.000)	(1.150.000.000)
Saldo Modal	4.850.000.000	4.850.000.000
Saldo Laba :		
- Cadangan Umum	871.903.883	871.903.883
- Laba (Rugi) Ditahan	743.666.502	980.275.187
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14.899.591	(236.852.383)
Saldo Laba	1.630.469.976	1.615.326.687
Saldo Ekuitas	6.480.469.976	6.465.326.687

3.15. Pendapatan Bunga

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bunga yang diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Pendapatan Bunga Kontraktual		
- Pendapatan Bunga Jasa Giro	45.983.068	43.198.989
- Pendapatan Bunga Tabungan	3.240.886	3.386.869
- Pendapatan Bunga Deposito	1.230.985.877	1.393.335.570
- Pendapatan Bunga Kredit KMK - RK	7.522.568	146.082.058
- Pendapatan Bunga Kredit KKB Mobil	185.208.262	223.300.199
- Pendapatan Bunga Kredit KPR	-	13.278.967
- Pendapatan Bunga Kredit KPPR	38.771.231	26.305.489
- Pendapatan Bunga Kredit KMG	67.848.215	83.406.862
- Pendapatan Bunga Kredit KMK - Angsuran	429.166.938	151.924.062
- Pendapatan Bunga Kredit DL	791.870.981	674.863.071
- Pendapatan Bunga Kredit KAB	10.970.148	-
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	2.811.568.175	2.759.082.136
b. Pendapatan Provisi dan Beban Transaksi		
- Pendapatan Provisi Kredit	87.007.686	70.808.539
- Pendapatan Administrasi Kredit	42.220.791	40.020.100
- Beban Transaksi	1.443.640	-
Jumlah Pendapatan Provisi (Beban) Transaksi	130.672.117	110.828.639
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	2.942.240.292	2.869.910.774

3.16. Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Lainnya yang diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Pendapatan Administrasi Tabungan	100.392.591	103.692.334
- Pendapatan Administrasi Lainnya	190.500	300.000
- Pendapatan Pinalty Tabungan	611.000	595.000
- Pendapatan Denda Kredit	17.667.629	35.692.981
- Pendapatan Kredit Lainnya	25.775.705	116.512.648
- Pendapatan Jasa Transaksi	300.000	356.000
- Pendapatan Pemulihan PPAP Penempatan	-	-
- Pendapatan Pemulihan PPAP Kredit	35.613.630	66.006.551
- Pendapatan Operasional Lainnya	9.613.070	6.463.807
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	190.164.125	329.619.321

3.17. Beban Bunga

Jumlah tersebut merupakan Beban Bunga Kontraktual yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Beban Bunga Tabungan	317.232.597	328.336.176
- Beban Bunga Deposito Berjangka	390.946.077	450.400.069
- Beban Bunga Pihak Ketiga (LPS)	47.659.692	51.989.710
Jumlah Beban Bunga	755.838.366	830.725.955

3.18. Beban Penyisihan Kerugian Dan Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan yang wajib dibentuk Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Beban Penyisihan Kerugian :		
- Beban PPAP Penempatan Dana	-	27.000.000
- Beban PPAP Pinjaman	-	-
Jumlah beban Penyisihan Kerugian	-	27.000.000
b. Beban Penyusutan Aset Tetap :		
- Beban Penyusutan Aset Tetap	88.862.220	69.468.926
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	88.862.220	69.468.926
Jumlah Beban Penyi Kerugian & Penyusutan	88.862.220	96.468.926

3.19. Beban Pemasaran

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemasaran yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
- Beban Iklan dan Promosi	2.915.500	2.561.200
Jumlah beban Pemasaran	2.915.500	2.561.200

3.20. Beban Administrasi Dan Umum

Jumlah tersebut merupakan Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Beban Tenaga Kerja	1.633.441.090	1.812.541.103
- Beban Pendidikan	76.950.802	91.107.648
- Beban Sewa	129.482.180	129.449.620
- Beban Premi Asuransi	23.998.227	24.359.828
- Beban Pajak (Non PPh)	9.402.460	11.525.615
- Beban Pemeliharaan & Perbaikan	46.226.987	74.306.383
- Beban Barang & Jasa	314.141.629	329.691.537
Jumlah Beban Administrasi Dan Umum	2.233.643.375	2.472.981.733

3.21. Beban Operasional Lainnya

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasional Lainnya yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Beban Insentif	1.750.000	480.000
- Beban Selisih Kas	392	599
- Beban Operasional Lainnya	5.433.468	4.678.167
Jumlah Beban Operasional Lainnya	7.183.860	5.158.766

3.22. Pendapatan Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Non Operasional yang diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 & 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Laba Penjualan Aset Tetap	-	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional	-	-

3.23. Beban Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Beban Non Operasional yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Beban Iuran Perbarindo	12.000.000	12.000.000
- Beban Iuran OJK	13.545.229	13.369.500
- Beban Kerugian Aset Tetap	2	-
- Beban Sumbangan	1.674.750	1.560.000
Jumlah Beban Non Operasional	27.219.981	26.929.500

3.24. Pajak Penghasilan Badan

Jumlah tersebut merupakan Taksiran Pajak Penghasilan Badan sampai dengan per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Taksiran Pajak Penghasilan Badan	1.841.523	1.556.398
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan Badan	1.841.523	1.556.398

3.25. Laba (Rugi) Setelah Pajak

Jumlah tersebut merupakan Laba (Rugi) setelah pajak sampai dengan per 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
Laba (Rugi) Setelah Pajak	14.899.591	(236.852.383)
Jumlah Laba (Rugi) Setelah Pajak	14.899.591	(236.852.383)

3.26. Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen PT. BPR Mitra Central Dana bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 11 Pebruari 2025.

LAMPIRAN

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
CAPITAL (PERMODALAN)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran I
Dalam Rupiah (Rp)

NO	KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO	JUMLAH
I Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)				
1	K a s	71.060.500	0 %	-
2	AYDA > 5 Tahun	269.609.236	0 %	-
3	Penempatan Pada Bank Lain	17.480.326.448	20 %	3.496.065.290
4	Kredit dgn Agunan Tanah / Bangunan dgn Hak Tanggungan	2.531.628.128	30 %	759.488.438
5	Kredit dgn Agunan Tanah / Bangunan tanpa Hak Tanggungan	5.178.826.465	50 %	2.589.413.233
6	Kredit UKM	-	70 %	-
7	Kredit dgn Agunan Kendaraan Bermotor	4.081.294.368	70 %	2.856.906.058
8	Kredit Lainnya	-	100 %	-
9	Kredit Jauh Tempo / Macet	338.883.588	100 %	338.883.588
10	Aset Tetap & Inventaris	258.449.523	100 %	258.449.523
11	Pendapatan Yang Akan Diterima	152.197.847	100 %	152.197.847
12	Asset Lain - Lain	263.852.570	100 %	263.852.570
	Jumlah ATMR	30.626.128.674		10.715.256.547
II Modal Inti				
1	Modal Disetor	4.850.000.000	100 %	4.850.000.000
2	Cadangan - Cadangan	871.903.883	100 %	871.903.883
3	Laba Ditahan	743.666.502	100 %	743.666.502
4	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14.899.591	50 %	7.449.795
5	AYDA Jatuh Tempo > 5 Tahun	(269.609.236)	100 %	(269.609.236)
	Jumlah Modal Inti	6.210.860.740		6.203.410.944
III Modal Pelengkap				
1	PPAP Umum			133.940.707
	Jumlah Modal			6.337.351.651
IV	Modal Minimum (12% X ATMR)	10.715.256.547	12 %	1.285.830.786
V	Kelebihan (Kekurangan) Modal			5.051.520.865
VI	Ratio CAR	6.337.351.651 10.715.256.547	100 %	59,14%
	BMPK			1.267.470.330

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
 ASSET QUALITY (KUALITAS ASET PRODUKTIF)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran II
 Dalam Rupiah (Rp)

NO	KETERANGAN	NOMINAL	%	JUMLAH
I Aset Produktif				
1	Giro	1.662.230.450		1.662.230.450
2	Tabungan	118.095.999		118.095.999
3	Deposito	15.700.000.000		15.700.000.000
4	KYD - Lancar	10.812.083.461		10.812.083.461
5	KYD - Dalam Perhatian Khusus	-		-
6	KYD - Kurang Lancar	979.665.500		979.665.500
7	KYD - Diragukan	-		-
8	KYD - Macet	338.883.588		338.883.588
	Jumlah Aktiva Produktif	29.610.958.997		29.610.958.997
II Aset Produktif Yang Diklasifikasikan				
1	KYD - Kurang Lancar	979.665.500	50 %	489.832.750
2	KYD - Diragukan	-	75 %	-
3	KYD - Macet	338.883.588	100 %	338.883.588
	Jumlah	1.318.549.088		828.716.338
III Ratio KAP		828.716.338	100 %	2,80%
		29.610.958.997		

PT. BPR MITRA CENTRAL DANA

RATIO LIKUIDITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lampiran V

Dalam Rupiah (Rp)

NO	KETERANGAN	JUMLAH
I	Loan To Deposit Ratio (LDR)	
1	Kredit Yang Diberikan	12.130.632.549
2	Dana Yang Diterima :	
	- Tabungan Nasabah	13.916.571.158
	- Deposito Berjangka Nasabah	9.618.415.474
	Jumlah	23.534.986.632
	Ratio LDR	$\frac{12.130.632.549}{23.534.986.632}$ 51,54 %
II	Cash Ratio	
1	Total Alat Likuid	
	- Kas	71.060.500
	- Giro	1.662.230.450
	- Tabungan	118.095.999
	Jumlah	1.851.386.948
2	Total Kewajiban Lancar	
	- Kewajiban Segera Dibayar	89.209.185
	- Tabungan Nasabah	13.916.571.158
	- Deposito Berjangka Nasabah	9.618.415.474
	Jumlah	23.624.195.817
	Ratio Cash	$\frac{1.851.386.948}{23.624.195.817}$ 7,84 %

KAP TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
AYAT JURNAL PENYESUAIAN
PT. BPR MITRA CENTRAL DANA
Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Reff	D	K
1	Pendapatan Selisih Kas Beban Selisih Kas	a	1.422,00	
		a		1.422,00
2	Pendapatan Pemulihan PPAP Kredit Beban PPAP Kredit	b	89.211.905,31	
		a		89.211.905,31
3	Persediaan Materai & Barang Cetak Beban Barang & Jasa	c	11.783.348,00	
		c		11.783.348,00
4	Beban Operasional Lainnya Pendapatan Bunga Kredit KPR	d	401.334,55	
		d		401.334,55
5	Taksiran Pajak Penghasilan Badan PPH Pasal 25 / 29 Badan	e	111.537,00	
		e		111.537,00
Jumlah			101.509.546,86	101.509.546,86

PT. BPR Mitra Central Dana
Direktur Utama,


Diana Sihombing

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	TJAHJO MACHDJUD MODOPURO

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT. BPR Mitra Central Dana
Posisi Laporan : 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini PT. BPR Mitra Central Dana menyatakan bahwa :

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahunan ini. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Dr. Eide Evana, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA. dari Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro.
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2024 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Palembang, 29 April 2025
PT. BPR Mitra Central Dana


Diana Sihombing Arief Rachman
Direktur Utama Direktur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	JL. MESJID LAMA NO.138A RT/RW:002/001 KEL. 17 ILIR, KEC. ILIR TIMUR I PALEMBANG 30125
Nomor Telepon	0711-353636
Penjelasan Umum	Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR telah mencakup prinsip keterbukaan; akuntabilitas; tanggung jawab; independensi; dan kewajaran dan paling sedikit diwujudkan dalam 11 faktor. BPR harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Keterangan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi kepada Direksi		
Keterangan		

Form E.02.03
Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program
Kerja Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------

0

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Dewan Komisaris				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan

:

Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	228.000.000	2	172.000.000
Tunjangan	2	9.000.000	1	1.500.000
Tantiem	0	0	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		237.000.000		173.500.000
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	0	0	0	0
Asuransi Kesehatan	2	11.263.045	1	4.075.000
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		11.263.045		4.075.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		248.263.045		177.575.000

KEBIJAKAN YANG TELAH ADA DI RUPS HANYA MENGENAI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN YANG DIBERIKAN BAIK UNTUK DIREKSI MAUPUN KOMISARIS.

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,24
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	9,34
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	7,79
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	9,34
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	9,34

KETENTUAN GAJI DITUANGKAN DALAM BENTUK SK (SURAT KEPUTUSAN) DIREKSI.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
24-04-2024	2	REALISASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024
31-07-2024	2	REALISASI RENCANA BISNIS TRIWULAN II TAHUN 2024
25-10-2024	2	PELAKSANAAN RENCANA BISNIS TRIWULAN III TAHUN 2024
30-01-2025	2	PELAKSANAAN RENCANA BISNIS TRIWULAN IV TAHUN 2024

SALAH SATU DEWAN KOMISARIS TINGGAL DI KOTA JAKARTA, SEHINGGA SETIAP TIGA BULAN SEKALI YANG BERSANGKUTAN DATANG KE KOTA PALEMBANG UNTUK EVALUASI DAN RAPAT BERSAMA.

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	

DEWAN KOMISARIS SETIAP MENGADAKAN RAPAT SELALU HADIR SECARA FISIK ATAU TATAP MUKA.

Form E.08.00

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

0

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

0

Form E.10.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

0

Form E.11.00

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Central Dana

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	-------------

0

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Mesjid Lama No.138A RT/RW:002/001 Kel. 17 ILIR, Kec. Ilir Timur I Palembang 30125
Nomor Telepon	0711-353636
Penjelasan Umum	Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR telah mencakup prinsip keterbukaan; akuntabilitas; tanggung jawab; independensi; dan kewajaran dan paling sedikit diwujudkan dalam 11 faktor yaitu aspek pemegang saham; pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko dan strategi anti <i>fraud</i> , termasuk sistem pengendalian intern; batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah; integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan rencana bisnis BPR. BPR harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	: 1671165309800001
	Nama	: Diana Sihombing
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	▪ Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. ▪ Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. ▪ Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. ▪ Menetapkan peraturan Perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. ▪ Mengevaluasi pelaksanaan peraturan Perusahaan dan kinerja karyawan. Mengatur ketentuan tentang Karyawan, termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengangkat dan memberhentikan Karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan. ▪ Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa Karyawan. ▪ Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. ▪ Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan. ▪ Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. ▪ Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya : Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

	▪ Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ▪ Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. ▪ Menyelenggarakan RUPS sesuai kebutuhan Perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, antara lain memuat strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). ▪ Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, seperti transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat dibawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku. ▪ Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh Karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko termasuk mengembangkan budaya sadar resiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif. ▪ Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan mengenai manajemen risiko. ▪ Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab yang menangani fungsi manajemen risiko dengan satuan kerja atau Karyawan yang melaksanakan fungsi operasional penghimpunan dan penyaluran dana. ▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan harus keseluruhan. ▪ Mengusulkan kebijakan dan prosedur yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. ▪ Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM. ▪ Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. ▪ Memastikan bahwa seluruh Karyawan, khususnya dari satuan kerja terkait dan Karyawan baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala.
--	--

- Direksi wajib bertanggung jawab atas Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan disektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan masyarakat.
- Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
- Direksi bertanggung jawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
- Direksi bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
- Direksi bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.
- Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.
- Direksi wajib menyusun, menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memuat paling sedikit :
 - a. Struktur remunerasi paling sedikit :
 - (1) Skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan;
 - (2) Komponen remunerasi.
 - b. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.
- **Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan** : Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Karyawan.
- Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi lainnya.

2.	NIK	:	1671051406830010
	Nama	:	Arief Rachman
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	▪ Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. ▪ Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. ▪ Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. ▪ Menetapkan peraturan Perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. ▪ Mengevaluasi pelaksanaan peraturan Perusahaan dan kinerja karyawan. Mengatur ketentuan tentang Karyawan, termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengangkat dan memberhentikan Karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan. ▪ Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa Karyawan. ▪ Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. ▪ Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan. ▪ Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. ▪ Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya : Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. ▪ Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ▪ Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. ▪ Menyelenggarakan RUPS sesuai kebutuhan Perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

	▪ Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, antara lain memuat strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>). ▪ Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, seperti transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat dibawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku. ▪ Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh Karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko termasuk mengembangkan budaya sadar resiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif. ▪ Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan mengenai manajemen risiko. ▪ Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab yang menangani fungsi manajemen risiko dengan satuan kerja atau Karyawan yang melaksanakan fungsi operasional penghimpunan dan penyaluran dana. ▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan harus keseluruhan. ▪ Mengusulkan kebijakan dan prosedur yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. ▪ Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM. ▪ Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. ▪ Memastikan bahwa seluruh Karyawan, khususnya dari satuan kerja terkait dan Karyawan baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala. ▪ Direksi wajib bertanggung jawab atas Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan disektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan masyarakat. ▪ Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
--	---

	▪ Direksi bertanggung jawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. ▪ Direksi bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan. ▪ Direksi bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR. ▪ Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR. ▪ Direksi wajib menyusun, menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memuat paling sedikit : a. Struktur remunerasi paling sedikit : (1) Skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; (2) Komponen remunerasi. b. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.
	A. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris (Semester I): 1. Ada beberapa langkah yang dilakukan Dirut untuk peningkatan kredit, antara lain: a) Memperkuat Marketing untuk terus mencari Calon Debitur baru maupun lama baik yang di Palembang maupun di Jalur; b) Dirut melaksanakan pendekatan kepada Debitur lama agar mereka tidak lari ke Bank lain; c) Bekerjasama dengan Marketing Freelance, dimana mereka sudah memahami jenis kredit dan persyaratan yang ada di BPR; d) Bekerjasama dengan perusahaan yang menjual mesin pertanian; e) Meminta rekomendasi dari Debitur lama. 2. Mitigasi yang dilakukan terhadap Kredit Demand Loan (DL): a) Melakukan monitoring terhadap kredit yang akan jatuh tempo 1 (satu) bulan sebelumnya dengan menelepon yang bersangkutan untuk mengingatkan kapan pembayarannya dengan kunjungan secara langsung; b) Berkomunikasi dengan Kepala Desa atau orang yang dipercaya di daerah Jalur untuk menanyakan kondisi disana dan kapan jadwal panen; 3. Penyelesaian kredit bermasalah: a) Melakukan penagihan secara online; b) Membuat Surat Peringatan dan Surat Sita; c) Meminta bantuan orangtua atau keluarga yang bersangkutan; d) Membantu untuk mencari pembeli jaminan. 4. Penyelesaian AYDA: a) Akan menjajaki kerja sama dengan Bank J Trust Investments dan Paper Id; b) Akan bekerja sama dengan pengacara an. Hartoyo untuk melakukan pendekatan dan penekanan;

c) Berkonsultasi dengan Notaris mengenai keabsahaan Surat Kuasa Jual yang sudah ada. 5. Monitoring ABA terus dilakukan antara Direksi dan Kepala Bagian Accounting, dimana monitoring dilakukan dengan mengevaluasi laporan publikasi pertriwulan dan jika ada NPL dan KPMM serta LDRnya sudah tidak baik atau merugi maka akan dilakukan pencairan terutama untuk penempatan di BPR diluar SUMSEL.
B. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris (Semester II): Hal-hal yang akan dilakukan Direksi: 1. Mengikuti beberapa pelatihan terkait CKPN yang dilakukan oleh Lembaga lain dan USSI pada bulan Januari dan Maret tahun 2025; 2. Memberikan bunga special rate untuk deposito minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk deposan lama maupun baru dengan syarat & ketentuan yang berlaku; 3. Melakukan proses rekrutmen calon Karyawan posisi Marketing Officer baru sebanyak 4 (empat) orang; 4. Mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh lembaga lain maupun <i>inhouse training</i>.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	: 3275121612580002
	Nama	: Bambang Setiawan
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	▪ Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. ▪ Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. ▪ Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan kebijakan strategis BPR dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. ▪ Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.

	▪ Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan serta Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. ▪ Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasi oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ▪ Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya. ▪ Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS. ▪ Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang Direksi jika bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan. ▪ Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan/semester. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Perusahaan. ▪ Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. ▪ Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. ▪ Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait. ▪ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan masyarakat.
--	---

		▪ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. ▪ Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. ▪ Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan pengawasan dan pelaksanaan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat. ▪ Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. ▪ Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi kebijakan nominasi.
2.	NIK	: 1671112501810005
	Nama	: Andreas Adi Pribadi Harjono
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	▪ Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. ▪ Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. ▪ Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan kebijakan strategis BPR dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. ▪ Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. ▪ Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan serta Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

	▪ Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasi oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ▪ Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya. ▪ Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS. ▪ Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang Direksi jika bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan. ▪ Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan/semester. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Perusahaan. ▪ Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. ▪ Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. ▪ Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait. ▪ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan masyarakat. ▪ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
--	---

	▪ Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. ▪ Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan pengawasan dan pelaksanaan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat. ▪ Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. ▪ Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi kebijakan nominasi.
	A. Rekomendasi Dewan Komisaris (Semester I): 1. Membuat <i>action plan</i> untuk meningkatkan volume penyaluran kredit, memperbaiki rasio LDR, ROA, BOPO; 2. Meningkatkan mitigasi yang lebih baik dalam penyaluran kredit, terutama kredit Demand Loan yang masih mendominasi penyaluran kredit; 3. Meningkatkan monitoring dan pemeliharaan terhadap kredit-kredit eksisting untuk pencegahan dini timbulnya risiko kredit baru, terutama di wilayah Jalur dan sekitarnya; 4. Menyelesaikan kredit bermasalah secara intensif, baik melalui penagihan, eksekusi penjualan jaminan, maupun lelang untuk menekan angka NPL yang masih tidak seha, antara lain atas nama Debitur Djaja Santoso (macet) dan Yateno (DPK); 5. Mengeksekusi AYDA atas nama Ahmad Hidayatullah yang sudah bertahun-tahun belum dapat diselesaikan; 6. Meningkatkan monitoring terhadap penempatan dana ABA di BPR-BPR lain yang tersebar di Pulau Jawa. B. Rekomendasi Dewan Komisaris (Semester II): 1. BPR harus meningkatkan kemampuan IT dan pengembangan <i>Core Banking System</i>, dalam rangka penyesuaian dengan regulasi CKPN, peningkatan, pelayanan, dan digitalisasi sistem perbankan dalam rangka menghadapi persaingan; 2. BPR harus meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, khususnya deposito pihak ketiga dalam rangka pengembangan aset dan peningkatan penyaluran kreditnya; 3. BPR hendaknya lebih banyak menyalurkan kredit-kredit dengan plafond rendah, khususnya kredit angsuran, dan lebih berhati-hati dengan penyaluran kredit DL dan kredit sindikasi; 4. BPR harus mengoptimalkan kemampuan SDM dengan mengikut-sertakan karyawan dalam pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan BPR; 5. Kualitas Internal Audit dan kemampuan Internal Audit harus dikembangkan dengan diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan Internal Audit dalam rangka pengendalian risiko BPR yang lebih baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
	Komite Lainnya

5.	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.		NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
1.	1671165309800001	Diana Sihombing	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	1671051406830010	Arief Rachman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
1.	3275121612580002	Bambang Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	1671112501810005	Andreas Adi Pribadi Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
1.	1671115403470001	Lucy Minarni	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2.	1671111402440002	F Harjono Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

3.	1671115512730006	Silvia Suhanny Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
4.	1671116510740002	Sophia Suweni Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5.	3671125012770003	Imelda Suciana Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
6.	1671112501810005	Andreas Adi Pribadi Harjono	Tidak Ada	Ada	Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
1.	1671165309800001	Diana Sihombing	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	1671051406830010	Arief Rachman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
1.	3275121612580002	Bambang Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	1671112501810005	Andreas Adi Pribadi Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Anak Kandung)

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
1.	1671115403470001	Lucy Minarni	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Orang tua)
2.	1671111402440002	F Harjono Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Orang tua)
3.	1671115512730006	Silvia Suhanny Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Anak Kandung)
4.	1671116510740002	Sophia Suweni Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Anak Kandung)
5.	3671125012770003	Imelda Suciana Harjono	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Anak Kandung)
6.	1671112501810005	Andreas Adi Pribadi Harjono	Tidak Ada	Ada	Ada (Anak Kandung)

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	228.000.000,00	2	172.000.000,00
2.	Tunjangan	2	9.000.000,00	1	1.500.000,00
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		237.000.000,00		173.500.000,00
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan	2	11.263.045,00	1	4.075.000,00
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya		11.263.045,00		4.075.000,00
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		248.263.045,00		177.575.000,00

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,24% - 2,58%
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	9,34% - 8,23%
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	7,79% - 6,23%
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	9,34% - 7,79%
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	9,34% - 4,24%

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24/04/2024	2	Realisasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2024
2.	31/07/2024	2	Realisasi Rencana Rencana Bisnis Triwulan II Tahun 2024
3.	25/10/2024	2	Pelaksanaan Rencana Bisnis Triwulan III Tahun 2024
4.	30/01/2025	2	Pelaksanaan Rencana Bisnis Triwulan IV Tahun 2024

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3275121612580002	Bambang Setiawan	4		100,00
2.	1671112501810005	Andreas Adi Pribadi Harjono	4		100,00

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)

Palembang, 28 April 2025
PT. BPR Mitra Central Dana


Diana Sihombing
 Direktur Utama




Bambang Setiawan
 Komisaris Utama